

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Henny Yulsiati¹, Choiruddin²

^{1,2} Politeknik Negeri Sriwijaya

Info Artikel

Article history:

Received Jul, 2025

Revised Jul, 2025

Accepted Jul, 2025

Kata Kunci:

Analisis Laporan Keuangan;
Kinerja keuangan; Pendapatan
Asli Daerah

Keywords:

Financial Performance; Financial
Report Analysis; Local Own-source
Revenue

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2018-2022 dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dokumen laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai data sekunder untuk penelitian ini. Temuan analisis dalam penelitian ini berasal dari analisis rasio keuangan dan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan analisis tren dan varians, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung cukup memuaskan, menurut temuan penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi PAD, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kinerja PAD yang efektif tetapi tidak efisien. Selain itu, kontribusi PAD terhadap total pendapatan provinsi sudah dalam kategori baik berdasarkan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the Lampung Provincial government's financial performance from 2018 to 2022 in terms of Local Own-source Revenue (PAD). Documents from local government financial reports serve as secondary data for this study. The analysis findings in this study are derived from financial ratio analysis and government financial reports. According to trend and variance analysis, the Lampung Provincial government's financial performance is fairly satisfactory, according to the research findings. According to the results of the PAD effectiveness and efficiency ratio calculation, the Lampung Provincial government has an effective but inefficient PAD performance. Additionally, the PAD contribution to the province's total income is already in the good category based on the ratio analysis of the degree of fiscal decentralization.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Henny Yulsiati

Institution: Politeknik Negeri Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: henny.yulsiati@polsri.ac.id

1. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang harus diterima pemerintah daerah sebagai kewajiban dalam kewenangan yang diberikan adalah kebutuhan akan pembangunan dan pemerintahan daerah yang efisien. Kewenangan yang diberikan kepada daerah disebut otonomi daerah. Otonomi daerah didefinisikan sebagai pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi urusan pemerintahannya sendiri guna memajukan kepentingan masyarakat setempat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Kewenangan dan kewajiban untuk menetapkan, mengawasi, dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerahnya sendiri diamanahkan kepada pemerintah.

Otonomi daerah dicontohkan oleh desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus tetap menjadi pedoman dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan dan kondisi daerahnya, maka mereka diberi kewenangan ini. Oleh karena itu, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pemerintah daerah.

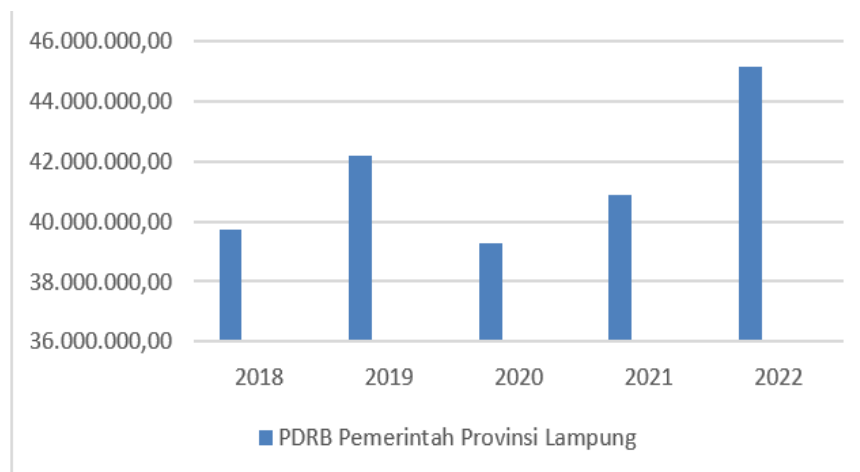
Kesehatan keuangan pemerintah daerah diukur melalui sejumlah indikator. Indeks Harga Konsumen (IHK), PDB atas dasar harga konstan (ADHK), pertumbuhan PDB, nilai ekspor (selain migas), volume ekspor, nilai impor, dan volume impor merupakan beberapa komponen penyusun statistik ini, yang juga mencakup PDB dan tingkat inflasi. Selain itu, kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDB suatu daerah dapat digunakan untuk menentukan struktur ekonominya.

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Di Pulau Sumatra, Provinsi Lampung berpotensi untuk berkembang menjadi pusat ekonomi baru. Provinsi Lampung juga gigih dalam upayanya untuk mempromosikan pariwisata budaya dan ekologi. Lokasi geografisnya yang strategis di dekat Jawa sangat ideal untuk menciptakan kawasan ekonomi baru.

Tabel 1. Data PDRB per Kapita Daerah Pemerintah Provinsi Lampung

Tahun	PDRB (Rupiah)
2018	Rp 39,716,465
2019	Rp 42,172,315
2020	Rp 39,290,332
2021	Rp 40,872,867
2022	Rp 45,129,335

Sumber: BPS Pemprov Lampung



Gambar 1. Grafik Peningkatan PDRB Pemerintah Provinsi Lampung

Sumber: BPS Pemprov Lampung

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Provinsi Lampung bervariasi selama lima tahun berturut-turut, dari tahun 2018 hingga 2022, menurut data pada Tabel 1.1 dan Grafik 1.1. Namun, terjadi peningkatan tajam sebesar 45.129.335 (juta Rupiah) pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Pemerintah Provinsi Lampung bervariasi dari tahun ke tahun. Lebih dari tujuh belas sektor yang membentuk produk regional bruto (PDRB) Provinsi

Lampung adalah yang mendorong ekonomi lokal. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dapat dipengaruhi oleh PDRB.

PAD akan menurun seiring dengan penurunan PDRB. Di sisi lain, PAD akan meningkat seiring dengan peningkatan PDRB (Dimas Priyono, 2021). Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung akan diuntungkan oleh peningkatan PDB tahun 2022. Kapasitas daerah memiliki peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Cara pemerintah daerah mengelola keuangannya dapat digunakan untuk mengukur kapasitas daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. Evaluasi kinerja pemerintah diperlukan untuk menjawab tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja daerah. Hal ini terutama berlaku dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah, yang merupakan tanda konkret pelaksanaan otonomi daerah. Rasio keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan daerah dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah, yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan potensi keuangan daerah.

Meningkatkan kinerja pemerintah, memaksimalkan potensi daerah, membantu pengambilan keputusan, dan mempertimbangkan data yang tersedia untuk publik merupakan tujuan pengukuran kinerja (Taryoko, 2016). Rasio kemandirian, efektivitas keuangan, efisiensi, ketergantungan, dan pertumbuhan daerah merupakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu daerah.

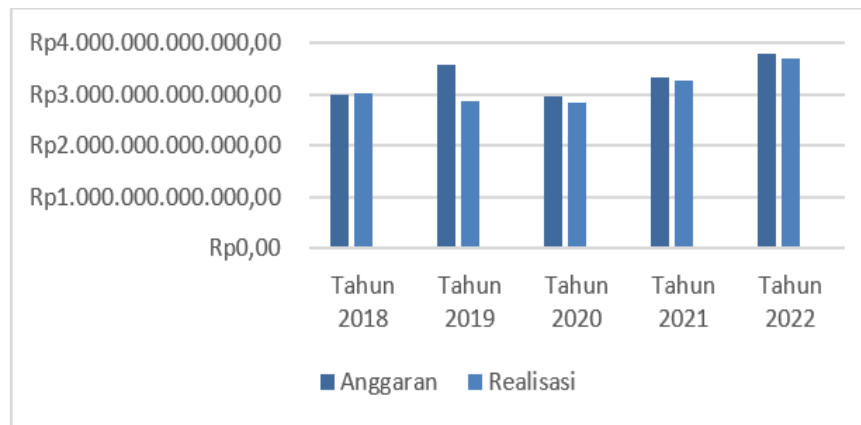
Susanto (2019) menyatakan bahwa tujuan pemantauan kinerja keuangan daerah adalah untuk menilai tingkat efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sektor publik. Kemampuan memperoleh dan mengelola keuangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan tetap menjunjung tinggi konsep efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran anggaran diharapkan dimiliki oleh pemerintahan daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, derajat desentralisasi fiskal, variasi, dan tren kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditentukan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbedaan antara pendapatan yang diproyeksikan dan pendapatan aktual akan dinilai menggunakan analisis varians. Analisis tren akan menunjukkan bagaimana kinerja telah berubah dari waktu ke waktu. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh pemerintah daerah akan ditunjukkan oleh derajat desentralisasi fiskal. Kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai atau melaksanakan PAD-nya dalam mengawasi dan menjalankan operasinya sendiri akan dievaluasi dengan rasio efektivitas. Perbedaan antara pengeluaran aktual pemerintah daerah dan pendapatannya dapat ditentukan dengan menggunakan rasio efisiensi. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah diaudit periode 2018–2022 pada situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Lampung (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), yang dikutip dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Lampung, terdapat peningkatan dan penurunan PAD yang cukup signifikan (lihat Tabel 1.2).

Tabel 2. Data Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung

Tahun	Anggaran (Juta)	Realisasi (Juta)	Selisih (Juta)
2018	Rp 2,987,249	Rp 3,018,067	-Rp 30,817
2019	Rp 3,565,784	Rp 2,864,235	-Rp 701,548
2020	Rp 2,962,401	Rp 2,842,286	-Rp 120,115
2021	Rp 3,336,257	Rp 3,249,669	-Rp 86,587
2022	Rp 3,784,650	Rp 3,678,302	-Rp 106,384

Sumber: PPID Pemprov Lampung



Gambar 2. Grafik Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung

Sumber: PPID Pemprov Lampung

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang signifikan selama lima tahun berturut-turut, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.2 dan Gambar 1.2. Pada tahun 2022, tahun terakhir, PAD mengalami peningkatan sebesar Rp 3.784.650.845.884,74. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Pertumbuhan di wilayah Provinsi Lampung berdampak positif terhadap peningkatan PAD. Lebih lanjut, pertumbuhan PAD yang berkelanjutan diantisipasi akan mendorong percepatan ekspansi ekonomi daerah, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu oleh (Soviana & Suparno, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015, 2016, dan 2019, kemandirian keuangan daerah Provinsi Aceh sebesar 10,33%, termasuk dalam kelompok sangat rendah dengan pola hubungan instruksional. Selain itu, Harahap & Nasution (2019) melakukan studi serupa dengan mengkaji tingkat efikasi dan kemandirian keuangan daerah Kota Medan dari tahun 2012 hingga 2016. Kesimpulan analisis data sama sekali tidak terpengaruh oleh kondisi pemerintahan kota lainnya. Dengan memanfaatkan potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD), Kota Medan mampu mengelola anggarannya secara mandiri.

Untuk mengetahui kapabilitas pemerintah daerah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung. Pemahaman ini mencakup pemahaman realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, serta kemandirian pendanaan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kegiatan operasional pemerintahan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selama sembilan tahun berturut-turut dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2023. Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tercermin dalam penilaian BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, BPK telah menyusun dan mengaudit laporan keuangan tahun anggaran 2022 (Ghazaldi, 2023).

2. LANDASAN TEORI

2.1 *Pendapatan Asli Daerah*

Pendapatan daerah, yang didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan bersih pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pajak, retribusi, pendapatan perusahaan dan aset, serta sumber pendapatan asli daerah lainnya termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena PAD dapat digunakan untuk mendanai berbagai program dan inisiatif pemerintah

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PAD sangat penting bagi pembangunan daerah.

Jika kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) relatif rendah, tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat cenderung meningkat. Semakin mandiri suatu daerah, semakin kecil ketergantungannya (Juliawati, 2019).

2.2 Kinerja Keuangan Daerah

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara holistik tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian berbagai sumber daya keuangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan daerah mencakup seluruh tanggung jawab dan hak pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diukur secara kuantitatif, termasuk kas dan aset lain yang dikuasai pemerintah daerah.

Untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah, pendapatan dan belanja daerah dinilai dalam periode anggaran tertentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Haryanto, 2014). Kinerja keuangan, yang dapat diukur dengan indikator keuangan, merupakan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program yang sejalan dengan rencana organisasi.

Pemerintah menggunakan pengukuran kinerja keuangan daerah sebagai alat untuk menilai efektivitas dan efisiensi tata kelola keuangan publik. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran daerah. Keselarasan antara hasil dan perencanaan merupakan indikator kinerja yang optimal. Oleh karena itu, penilaian keberhasilan kinerja juga mencakup pemeriksaan kebijakan yang ditetapkan dan dampak yang ditimbulkannya (Putri, 2018).

2.3 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Metode dan teknik yang harus digunakan dalam menganalisis laporan keuangan, sebagai berikut:

a. Teknik Analisis Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Mahmudi (2016:90), teknik analisis laporan keuangan meliputi:

1. Analisis Perubahan Laporan Keuangan

Membandingkan item yang sama dari dua laporan keuangan dari periode yang berbeda merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis perubahan akun keuangan. Menemukan perubahan dari satu periode ke periode berikutnya adalah tujuannya..

2. Analisis *Common Size*

Membandingkan suatu item dengan total dalam laporan keuangan yang sama adalah cara dilakukannya analisis ukuran umum, yang juga dikenal sebagai analisis persentase per komponen. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah total kontribusi yang diberikan oleh sebuah postingan.

3. Analisis Tren

Menurut Subanar (2009) Analisis tren juga disebut analisis time-series. Analisis time-series yang salah satu tujuannya tidak lain adalah untuk menemukan suatu keteraturan pola yang dapat digunakan dalam peramalan kejadian mendatang. Analisis tren dapat menentukan bagaimana kecendrungan melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Analisis trend didasarkan pada data historis dari laporan keuangan pemerintah.

4. Analisis Varians (Selisih)

Selisih antara pendapatan aktual dan yang dianggarkan dihitung untuk menganalisis selisih pendapatan. Biasanya, selisih anggaran diungkapkan dalam

Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah. Pemahaman dan analisis pengguna laporan terhadap kinerja pendapatan sangat terbantu oleh informasi perbedaan anggaran. Tugas utama pembaca laporan dalam memeriksa varians anggaran pendapatan adalah:

1. Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nominal maupun persentase.
 2. Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar
 3. Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan
 4. Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan
- b. Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan salah satu metode yang lazim digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan suatu entitas, khususnya perusahaan. Melalui analisis ini, dapat diperoleh gambaran relatif mengenai kinerja operasional perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Ryanto (2010), penggunaan rasio keuangan memberikan ukuran yang bersifat komparatif guna menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan.

1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merefleksikan sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan sumber pendapatan telah didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan perusahaan milik daerah, pengelolaan aset daerah, serta pendapatan sah lainnya. Sementara itu, total pendapatan daerah mencerminkan keseluruhan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Untuk mengukur tingkat desentralisasi fiskal, digunakan suatu rasio yang membandingkan PAD terhadap total pendapatan daerah, sebagaimana dirumuskan dalam perhitungan berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Rasio ini merefleksikan tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar proporsi PAD, maka semakin tinggi pula kapasitas kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.

Tabel 3. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,00-20,00	Kurang
20,02-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah 2023

2. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan provinsi, serta pinjaman daerah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembelanjaannya secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap

bantuan eksternal. Nilai rasio yang semakin tinggi mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang semakin kuat.

Kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatannya sendiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Mahmudi (2016), perhitungan rasio ini dilakukan dengan membagi PAD dengan jumlah pendapatan transfer dan pinjaman yang diterima oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai rasio tersebut, semakin menunjukkan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara independen.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 4. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,00-20,00	Kurang
20,02-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah 2023

3. Rasio Tingkat Ketergantungan Daerah

Tingkat ketergantungan fiskal suatu daerah, serta kapasitasnya dalam membiayai berbagai program pembangunan secara mandiri, dapat diukur melalui rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi komponen dana transfer atau subsidi dari pemerintah pusat, seperti Dana Perimbangan. Rasio ini menggambarkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD guna mendukung kemandirian fiskal. Semakin besar proporsi PAD terhadap APBD (tanpa subsidi), semakin tinggi pula tingkat otonomi fiskal suatu daerah. Oleh karena itu, rasio penerimaan PAD terhadap APBD—dengan mengecualikan dana transfer—digunakan sebagai indikator dalam menilai derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan APBD Tanpa Subsidi}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,00-20,00	Kurang
20,02-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah 2023

4. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target

yang telah ditetapkan. Menurut Mahsun (2006), pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana transfer, maupun pendapatan sah lainnya disebut sebagai pendapatan yang terealisasi. Untuk mengukur tingkat efektivitas keuangan tersebut, digunakan rasio efektivitas yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan PAD berdasarkan potensi riil yang dimiliki. Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada.

Rasio Efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Efisiensi dalam konteks keuangan daerah diartikan sebagai rasio yang membandingkan antara total pendapatan yang diperoleh dengan total pengeluaran pemerintah daerah. Suatu kinerja keuangan dikatakan efisien apabila rasio tersebut berada di bawah angka satu atau kurang dari seratus persen. Rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola pendapatannya dengan pengeluaran yang relatif kecil, yang mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan yang semakin baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap besarnya biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan, guna memastikan bahwa proses pemungutan pendapatan dilakukan secara efisien dan tidak membebani anggaran secara berlebihan.

Rasio Efisiensi dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 6. Kriteria Penilaian Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria Penilaian Efektivitas
>100	Sangat Efektif
>90-100	Efektif
>80-90	Cukup Efektif
<60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Data Diolah 2023

3. METODE

3.1 Jenis Penelitian

Dampak efikasi dan kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung sepanjang periode anggaran 2018–2022 menjadi subjek studi kuantitatif ini. Aspek-aspek kejadian dan fenomena yang diamati dijelaskan dan dideskripsikan dalam studi ini secara metodis, akurat, dan realistis. Studi ini akan menyelidiki apakah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung pada periode anggaran 2018–2022 dipengaruhi oleh kemandirian dan efikasi keuangan daerah.

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Lampung. Waktu penelitian yang digunakan yaitu pada bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2023.

3.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah ruang lingkup umum yang mencakup subjek atau benda yang telah diidentifikasi oleh para peneliti untuk dipelajari dan kemudian sampai pada

kesimpulan. (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2018 - 2022.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik suatu populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* yang dipadukan dengan *purposive sampling* (Sugiyono, 2017: 81). *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2017). Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
2. Periode Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung selama lima tahun, untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai metode pengumpulan datanya. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung oleh peneliti, melainkan melalui pihak lain (Sugiyono, 2018). Disebut tidak langsung karena data tersebut didapatkan melalui perantara, seperti dokumen. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dari tahun 2018 hingga 2022.

3.5 Langkah-Langkah Analisis Laporan Keuangan

1. Menilai Kinerja Makro

Langkah pertama dalam menganalisis laporan keuangan adalah mengevaluasi kinerja makro ekonomi pemerintah daerah. Hal ini penting karena berhasil tidaknya operasi makro sangat erat kaitannya dengan laporan keuangan yang memberikan gambaran operasi mikro. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator standar keberhasilan kegiatan makro. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun 2018 hingga 2022 dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indeks makro.

2. Menilai Kinerja Program/Kegiatan

Evaluasi kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah adalah langkah kedua yang harus dilakukan sebelum menganalisis laporan keuangan. Laporan Pertanggungjawaban dan Pembangunan (LKPJ) tentang Pelaksanaan Tugas Bersama Pemerintah dan Pembangunan atau Laporan Pertanggungjawaban dan Pembangunan (LKPJ) Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dua dokumen yang dapat digunakan untuk melacak kinerja program dan kegiatan. Berdasarkan tiga dimensi E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, keberhasilan program atau kegiatan dinilai. Ekonomi mengacu pada penggunaan sumber daya yang masuk secara ekonomis tanpa membuang-buang uang, efisiensi mengacu pada kepatuhan terhadap pelaksanaan anggaran, dan efisiensi mengacu pada pencapaian tujuan.

3. Menilai Kinerja Keuangan

Setelah menilai kinerja makro ekonomi dan program dan kegiatan, langkah selanjutnya adalah menilai kinerja keuangan lebih lanjut dengan melihat laporan keuangan. Laporan keuangan seperti neraca, laporan operasi, laporan pelaksanaan anggaran, dan laporan arus kas menunjukkan kinerja keuangan. Laporan keuangan ini harus dianalisis untuk memberikan wawasan tentang kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menafsirkan data laporan keuangan untuk mengevaluasi efektivitas operasi keuangan; hasilnya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari data, mensintesis secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen, serta menyusun data ke dalam kategori dan uraiannya berdasarkan satuan, melakukan agregasi,

mengorganisasikannya ke dalam model, memilih data yang akan digunakan dan apa yang akan diteliti, serta menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010). Berdasarkan teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif yaitu melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk menyelesaikan permasalahan saat ini sesuai dengan tujuan penelitian. Tolak ukur yang akan digunakan pada teknik analisa ini adalah:

1. Teknik Analisis Laporan Keuangan

1) Analisis Varians

Pada penelitian ini digunakan analisis varians untuk mengukur Tingkat signifikansi perbedaan antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan. Langkah-langkah dalam melakukan teknik analisis varians yaitu sebagai berikut:

2) Analisis Trends

Peneliti menggunakan teknik analisis trends untuk melihat kecenderungan melakukan kinerja waktu ke waktu. Langkah-langkah dalam melakukan teknik analisis trends yaitu sebagai berikut:

2. Analisis Rasio Keuangan

1) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi digunakan dalam penelitian ini dapat melihat seberapa besar kontribusi PAD Provinsi Lampung terhadap total pendapatannya. Langkah-langkah dalam melakukan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal yaitu sebagai berikut:

- a. Diperlukan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Melakukan perhitungan antara Penerimaan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah
- c. Formula yang dipilih dalam rasio derajat desentralisasi fiskal, yaitu:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- d. Apabila sudah dilakukan perhitungan, maka hasil perhitungan tersebut dinilai berdasarkan kriteria. Kriteria dalam rasio derajat desentralisasi fiskal yaitu:

Tabel 7. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase	Kriteria Penilaian Efisiensi
>100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-89,99	Cukup Efisien
<80	Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 dalam Ell Karmeli,dkk. (2022)

2) Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian ini, kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan daerah yang dianggarkan dinilai dengan menggunakan rasio efektifitas. Langkah-langkah dalam melakukan rasio efektifitas pendapatan asli daerah dan pajak daerah yaitu sebagai berikut:

Rasio derajat desentralisasi digunakan dalam penelitian ini untuk melihat seberapa besar kontribusi PAD Provinsi Lampung terhadap total pendapatannya. Langkah-langkah dalam melakukan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal yaitu sebagai berikut:

- a. Diperlukan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Melakukan perhitungan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Target Pendapatan Asli Daerah.

- c. Formula yang digunakan dalam melakukan rasio efektifitas pendapatan asli daerah dan pajak daerah, yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- d. Apabila sudah dilakukan perhitungan, maka hasil perhitungan tersebut dinilai berdasarkan kriteria. Kriteria dalam melakukan rasio efektifitas pendapatan asli daerah dan pajak daerah yaitu:

Tabel 8. Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria Penilaian Kecermatan
>100	Tidak Cermat
90-100	Kurang Cermat
80-89,99	Cukup Cermat
<80	Cermat

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 dalam Elly Karmeli,dkk.(2022)

3) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio derajat desentralisasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PAD Provinsi Lampung terhadap total pendapatannya. Dengan menggunakan rasio efisiensi, penelitian ini memeriksa perbandingan antara realisasi total belanja dan realisasi pendapatan pemerintah. Langkah-langkah dalam melakukan rasio efisiensi pendapatan asli daerah dan pajak daerah adalah sebagai berikut: Diperlukan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- Melakukan perhitungan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Target Pendapatan Asli Daerah.
- Formula yang digunakan dalam melakukan rasio efektifitas pendapatan asli daerah dan pajak daerah, yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- Apabila sudah dilakukan perhitungan, maka hasil perhitungan tersebut dinilai berdasarkan kriteria. Kriteria dalam melakukan rasio efisiensi pendapatan asli daerah yaitu:

Tabel 9. Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
41% - 50%	Tidak Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 dalam Elly Karmeli,dkk.(2022)

4. PEMBAHASAN

4.1 Analisis Varians

Analisis Varian belanja dirumuskan sebagai berikut:

Analisis Varians = Realisasi Anggaran Belanja – Anggaran Belanja

Tabel 10. Analisis Varians Pendapatan asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran Pendapatan (Jutaan Rp)	Realisasi Pendapatan (Jutaan Rp)	Varians (Jutaan Rp)	%	Keterangan
2018	Rp 2,987,249	Rp 3,018,067	Rp 30,817	101	Menguntungkan
2019	Rp 3,565,784	Rp 2,864,235	Rp 701,548	80	Menguntungkan
2020	Rp 2,962,401	Rp 2,842,286	Rp 120,115	96	Menguntungkan
2021	Rp 3,336,257	Rp 3,249,669	Rp 86,587	97	Menguntungkan
2022	Rp 3,784,650	Rp 3,678,302	Rp 106,348	97	Menguntungkan

Sumber: (Data diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, varians Pemerintah Provinsi Lampung selama lima tahun antara tahun 2018 dan 2022 berada dalam rentang yang baik. Hal ini disebabkan oleh varians yang mendekati 100% dan lebih besar dari 0%. Namun, menurut Mahmudi (2019), penyerapan anggaran di bawah 90% dianggap buruk karena menunjukkan adanya permasalahan penganggaran. Hal ini menunjukkan bahwa hanya tahun 2019 yang dinilai buruk dari lima tahun tersebut. Kecuali tahun 2019, tahun anggaran 2018–2022 berada dalam kelompok yang baik karena nilai variansnya melebihi 90%.

4.2 Analisis Trend

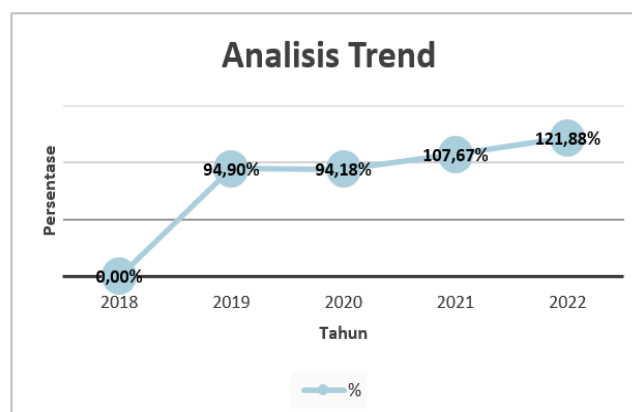
Analisis Trend dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Analisis Trend} = \frac{x_n}{x_{n-1}} \times 100\%$$

Tabel 11. Analisis Trend Pendapatan asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Indeks	Hasil Analisis
2018	3.018.067.291.159,88	100%	-
2019	2.864.235.753.079,13	100%	94,90%
2020	2.842.286.479.070,36	100%	94,18%
2021	3.249.669.847.265,05	100%	107,67%
2022	3.678.302.294.580,71	100%	121,88%

Sumber: (Data diolah, 2023)



Gambar 3. Grafik Analisis Trend Pendapatan asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Sumber: (Data diolah, 2023)

Dari tabel 4.2 dan grafik 4.1 di atas dapat dilihat hasil dari analisis trend pada pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Lampung dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa:

1. Tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah turun 5,10% dari angka indeks 100% menjadi 94,90%.
2. Tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah turun 5,82% dari angka indeks 100% menjadi 94,18%.
3. Tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah naik 7,67% dari angka indeks 100% menjadi 107,67%.
4. Tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah naik 21,88% dari angka indeks 100% menjadi 121,88%

Dari hasil analisis trend di atas dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah Provinsi Lampung mengalami penurunan selama tahun 2018-2020. Kemudian, terjadi kenaikan selama tahun 2020-2022.

4.3 Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 12. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD (Jutaan Rp)	Total Pendapatan-LRA (Jutaan Rp)	Rasio	Keterangan
2018	Rp3,018,067	Rp7,098,983	42,51%	Baik
2019	Rp2,864,235	Rp7,266,993	39,41%	Cukup
2020	Rp2,842,286	Rp7,019,319	40,49%	Baik
2021	Rp3,249,669	Rp7,469,649	43,51%	Baik
2022	Rp3,678,302	Rp6,836,946	53,80%	Sangat baik

Sumber: (Data diolah, 2023)

Perhitungan rasio desentralisasi fiskal di Provinsi Lampung secara umum menunjukkan hasil positif, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.3. Pada tahun 2018, persentasenya adalah 42,51%; pada tahun 2019, turun menjadi 39,41%. Pada tahun 2020, nilainya meningkat menjadi 40,49% dari tahun 2019. Selain itu, nilainya meningkat menjadi 43,51% pada tahun 2021. Selanjutnya, meningkat menjadi 53,80% pada tahun 2022. Hasil ini tersebar di seluruh provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih siap untuk melaksanakan desentralisasi.

4.4 Analisis Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 13. Analisis Rasio Efektifitas Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi (Jutaan Rp)	Anggaran (Jutaan Rp)	Rasio	Keterangan
2018	Rp 3,018,067	Rp 2,987,249	101,03%	Sangat efektif
2019	Rp 2,864,235	Rp 3,565,784	80,33%	Cukup efektif
2020	Rp 2,842,286	Rp 2,962,401	95,95%	Efektif
2021	Rp 3,249,669	Rp 3,336,257	97,40%	Efektif
2022	Rp 3,678,302	Rp 3,784,650	97,19%	Efektif

Sumber: (Data diolah, 2023)

Rasio efektivitas yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2018–2022 adalah 101,03% pada tahun 2018, 80,33% pada tahun 2019, 95,95% pada tahun 2020, 97,40% pada tahun 2021, dan 97,19% pada tahun 2022, berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efektivitas pada Tabel 4.4. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Lampung dari tahun 2018 hingga 2022 tergolong efektif. Angka rasio efektivitas yang hampir mendekati 100% antara tahun 2018 dan 2022, maka rasio tersebut tergolong efektif. Hal ini dimungkinkan karena nilai realisasi PAD Pemerintah Provinsi Lampung melebihi nilai anggaran PAD daerah.

4.5 Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 14. Analisis Rasio Efisiensi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Belanja (Jutaan Rp)	Realisasi PAD (Jutaan Rp)	Rasio	Keterangan
2018	Rp 6,328,527	Rp 3,018,067	210%	Tidak Efisien
2019	Rp 5,583,637	Rp 2,864,235	195%	Tidak Efisien
2020	Rp 5,735,949	Rp 2,842,286	202%	Tidak Efisien
2021	Rp 6,001,065	Rp 3,249,669	185%	Tidak Efisien
2022	Rp 5,433,259	Rp 3,678,302	148%	Tidak Efisien

Sumber: (Data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil studi pada Tabel 4.5, rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Lampung untuk tahun 2018–2022 adalah 210% pada tahun 2018, 195% pada tahun 2019, 202% pada tahun 2020, dan 185% pada tahun 2021. Mengingat nilai rasio tersebut lebih besar dari 100%, temuan analisis menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Lampung sangat tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemungutan pajak Pemerintah Provinsi Lampung tidak efektif. Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk merealisasikan pendapatannya daripada untuk mencapai pendapatannya, yang dapat menyebabkan inefisiensi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2018–2022 jika dilihat dari analisis varians dapat dikatakan menguntungkan karena secara rata-rata realisasi pendapatan daerah hampir mencapai 100% dari target yang ditetapkan, sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung periode 2018–2022 jika dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan analisis tren, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dinilai cukup baik karena persentasenya lebih dari 90% dan realisasi pendapatan provinsi tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup besar selama lima tahun terakhir. Karena derajat desentralisasi fiskal yang dimiliki selama lima tahun memiliki rasio rata-rata di atas 40%, maka kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dinilai baik berdasarkan pemeriksaan rasio derajat desentralisasi fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Provinsi Lampung sudah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatannya secara keseluruhan. Berdasarkan analisis rasio efektivitas, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dinilai efektif karena rata-rata rasio efektivitas selama lima tahun terakhir lebih dari 90%. Hal ini menunjukkan realisasi pendapatannya hampir mencapai target. Dengan rasio efisiensi lebih dari 100% selama lima tahun terakhir, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dinilai tidak efisien berdasarkan analisis rasio efisiensi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan lebih banyak uang untuk menghasilkan pendapatan daripada yang sebenarnya diterima.

5.2 Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan akan dapat menambah teknik analisis yang digunakan dan menambah periode waktu penelitian, agar dapat memperoleh hasil yang lebih lengkap dan akurat

DAFTAR PUSTAKA

- Dimas Priyono, H. R. (2021). Analisis Pengaruh Pdrb, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012-2018. *Diponegoro Journal Of Economics*, 8.
- Ghazaldi, A. (2023). *Pemprov Lampung Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-Turut dari BPK RI*. Rri.Co.Id. <https://www.rri.co.id/index.php/bandar-lampung/daerah/230227/pemprov-lampung-raih-opini-wtp-9-kali-berturut-turut-dari-bpk-ri>
- Harahap, J. P., & Nasution, M. D. (2019). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Haryanto. (2014). Analisis Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*.
- Juliawati. (2019). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Admnistrasi Bisnis*.
- Mahsun. (2006). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*.
- Putri. (2018). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*.
- Soviana, A., & Suparno. (2021). Analisis Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonimo Akuntansi (JIMEKA)*.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 81–82.
- Taryoko. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013*.